



**PENINGKATAN PERAN KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM
DI DESA SUMBERSALAK KABUPATEN JEMBER**

*INCREASING ROLE OF TOURISM CONSCIOUS GROUP
(POKDARWIS) IN THE DEVELOPMENT OF NATURAL TOURISM
IN THE VILLAGE OF SUMBERSALAK JEMBER REGENCY*

SKRIPSI

Oleh

**Bagaskara Alif Lilo I
NIM 130910201030**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENINGKATAN PERAN KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM
DI DESA SUMBERSALAK KABUPATEN JEMBER**

*INCREASING ROLE OF TOURISM CONSCIOUS GROUP
(POKDARWIS) IN THE DEVELOPMENT OF NATURAL TOURISM
IN THE VILLAGE OF SUMBERSALAK JEMBER REGENCY*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Bagaskara Alif Lilo I
NIM 130910201030

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Ibu saya tercinta, Siti Nurul Khamariah, yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penasehat yang baik atas segala keluh kesah saya.
2. Bapak saya tercinta, Drs. Dwi Tavip Santoso, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman, dan nasehat yang telah diberikan.
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semua sangat berarti.

MOTTO

“Hendaklah engkau bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah, dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan “seandainya aku melakukan, niscaya terjadi ini dan itu”. Tetapi katakanlah “ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan”. Sesungguhnya kata “seandainya” akan membuka perbuatan syaitan.”¹

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.”²

¹ HR. MUSLIM NO. 2664

² QS. AL INSYIRAH AYAT 5 - 8

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagaskara Alif Lilo I

NIM : 130910201063

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pengembangan Wisata Alam di Desa Summersalak Kabupaten Jember adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Bagaskara Alif Lilo I.

NIM 130910201030

SKRIPSI

**PENINGKATAN PERAN KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM
DI DESA SUMBERSALAK KABUPATEN JEMBER**

*INCREASING ROLE OF TOURISM CONSCIOUS GROUP
(POKDARWIS) IN THE DEVELOPMENT OF NATURAL TOURISM
IN THE VILLAGE OF SUMBERSALAK JEMBER REGENCY*

Oleh

Bagaskara Alif Lilo I

NIM 130910201030

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Selfi Budi H, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Wisata Alam di Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 8 April 2019

tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP 197003221995122001

Anggota Penguji,

1. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si (.....)
NIP 195805101987022001
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP (.....)
NIP 197410072000121001
3. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D (.....)
NIP 196102131988021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

“Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Wisata Alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”; Bagaskara Alif Lilo I ; 130910201030; 2019: 86 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Peningkatan peran kelompok sadar wisata dilakukan karena tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah maupun provinsi terkait keberlangsungan pengembangan pariwisata di desa sumbersalak agar terwujud sapta pesona. Diharapkan setelah terwujud mampu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa sumbersalak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, serta pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan triangulasi.

Dalam mengkaji peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam, peneliti menggunakan konsep Lingkup Kegiatan Kelompok Sadar Wisata dengan 6 lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada awalnya memang desa wisata sumbersalak terlihat sulit untuk dikembangkan dengan berbagai masalah awal yang muncul akan tetap lambat laun bersama dengan kesadaran bersama bahwa desa wisata dapat meningkatkan perekonomian desa maka Pokdarwis Damarwulan berani melakukan inisiatif awal untuk mengembangkan desa wisata. Inisiatif tersebut muncul sebagai bentuk asli dari peningkatan mereka yang pada awalnya juga sulit untuk berperan. Peningkatan

peran tersebut dilakukan POKDARWIS Damarwulan dengan cara swadaya dan swakarya, promosi desa wisata, dan kolaborasi Pokdarwis Damarwulan dengan instansi pendidikan yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan warga. Akan tetapi dalam perjalanannya peran POKDARWIS Damarwulan juga mengalami berbagai macam hambatan yakni dari segi keuangan yang minim serta ketergantungan terhadap seorang tokoh.



PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Wisata Alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Selfi Budi H, M.Si dan selaku Dosen Pembimbing 1 serta Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. Agus Suharsono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Kantor Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo terutama para pengurus dan anggota Kelompok Sadar Wisata

Damarwulan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.

8. Teman-teman dan sahabat saya yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

Bagaskara Alif L.I

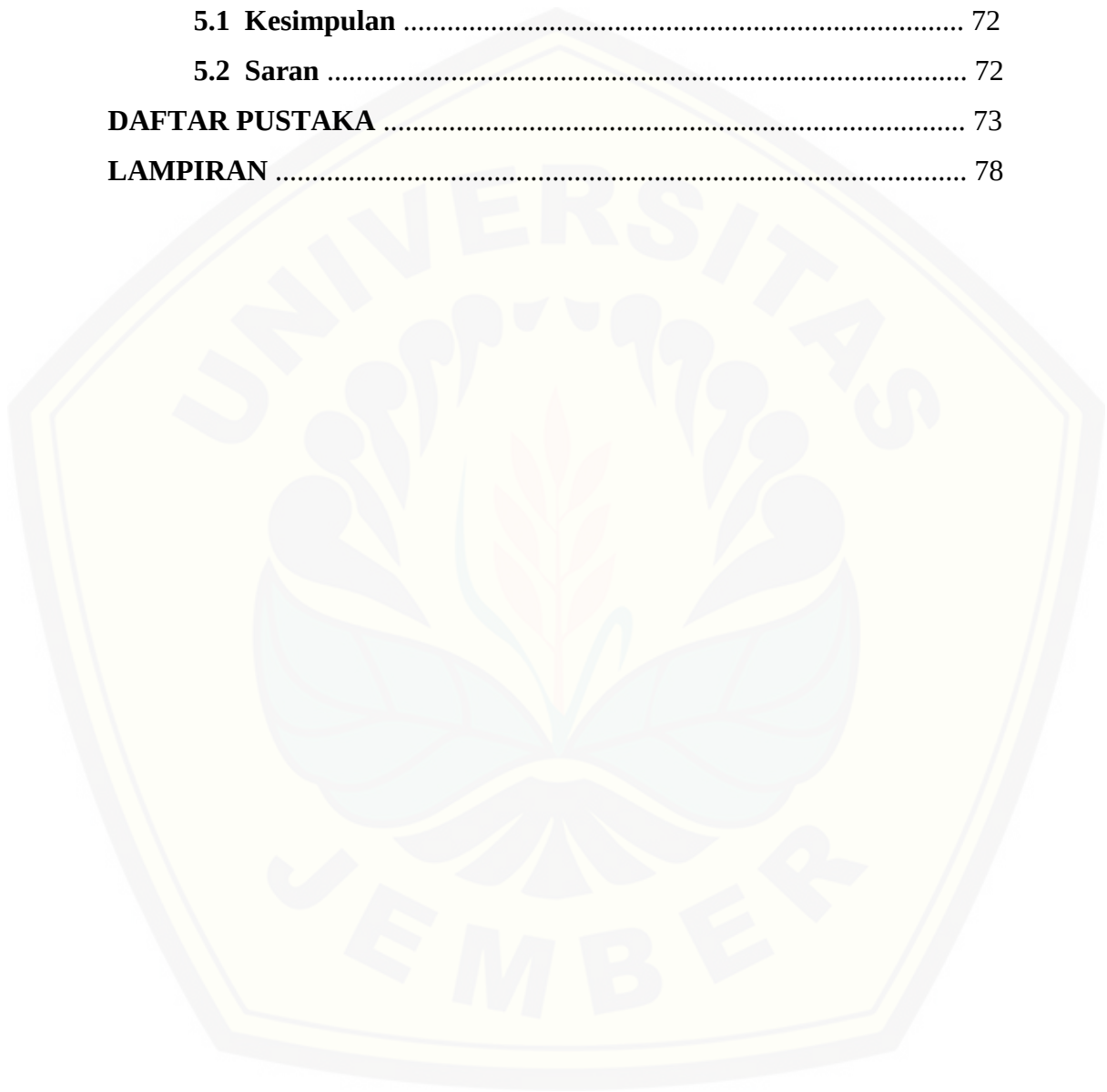
130910201030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Dasar	11
2.2 Administrasi Publik	12
2.3 Sound Governance	15
2.4 Organisasi Publik	20
2.5 Perilaku Organisasi	22
2.6 Peningkatan Peran	23
2.7 Pengembangan Wisata Alam	27
2.7.1 Wisata Alam	27
2.7.2 Pengembangan Wisata Alam	27
2.8 Kelompok Sadar Wisata	28

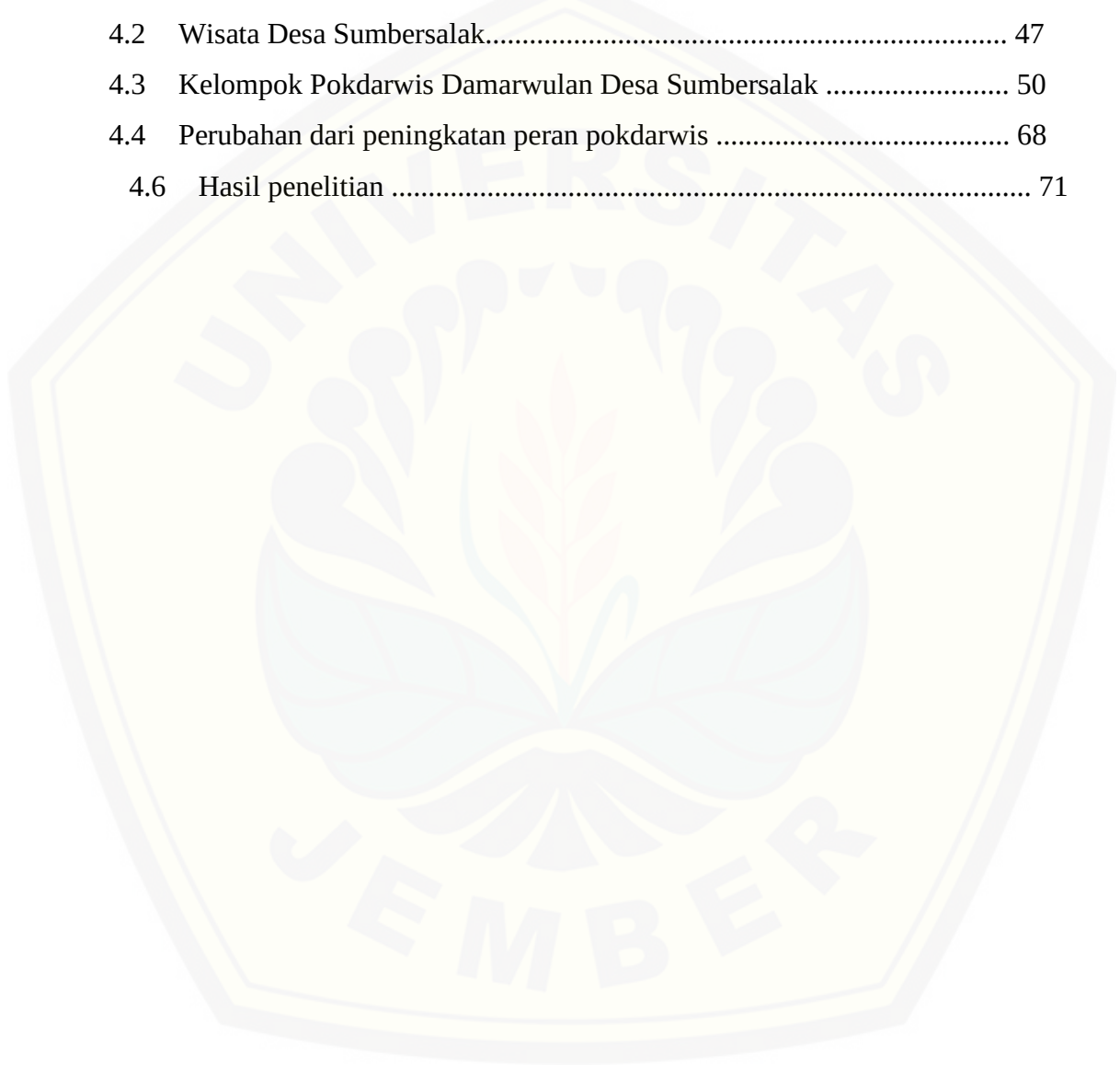
2.8.1 Tujuan Kelompok Sadar Wisata	28
2.8.2 Lingkup Kegiatan Kelompok Sadar Wisata	29
2.8.3 Dasar Hukum.....	30
2.9 Pemberdayaan Masyarakat	30
2.9.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2.9.2 Tahap pemberdayaan masyarakat	32
2.9.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	33
2.10 Kerangka Berpikir	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.3 Situasi Sosial	38
3.4 Desain Penelitian	39
3.4.1 Fokus Penelitian	39
3.4.2 Data dan Sumber Data	40
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	41
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	42
3.7 Teknik Penyajian Data	43
BAB 4. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Sejarah Desa Sumpalsak	45
4.2 Desa Wisata Sumpalsak	46
4.3 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Sumpalsak	49
4.4 Peningkatan Peran Pokdarwis Damarwulan	52
4.4.1 Penyuluhan dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Desa Wisata	56
4.4.2 Menggerakkan Swadana Dan Swakarya Pembangunan Objek Wisata	57
4.4.3 Promosi Desa Wisata Sumpalsak	64
4.4.4 Inisiator kerjasama POKDARWIS, Instansi Pendidikan dan Masyarakat	66

4.5 Penghambat Peningkatan Peran Pokdarwis Darmawulan	
Desa Wisata Sumpalsalak	69
4.6 Hasil Penelitian	71
BAB 5. PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78



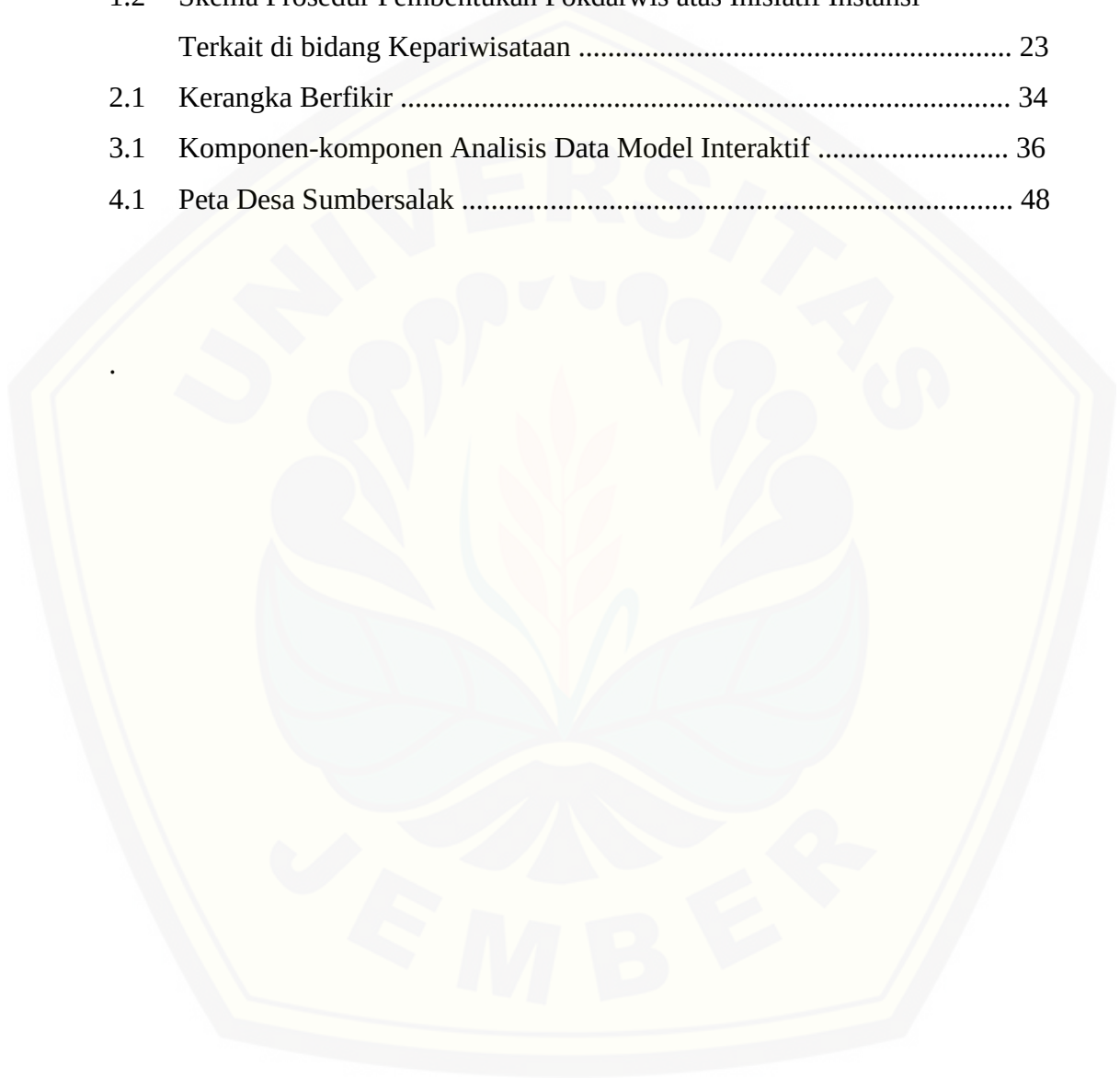
DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Wisata Alam Kabupaten Jember	6
1.2 Daftar Tempat Wisata Alam di Desa Sumpalsak	7
4.2 Wisata Desa Sumpalsak.....	47
4.3 Kelompok Pokdarwis Damarwulan Desa Sumpalsak	50
4.4 Perubahan dari peningkatan peran pokdarwis	68
4.6 Hasil penelitian	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Skema Prosedur Pembentukan Pokdarwis atas Inisiatif Masyarakat	5
1.2 Skema Prosedur Pembentukan Pokdarwis atas Inisiatif Instansi Terkait di bidang Kepariwisataaan	23
2.1 Kerangka Berfikir	34
3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	36
4.1 Peta Desa Sumpalsalak	48



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian penelitian ini mendeskripsikan tentang peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata terutama wisata alam oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kelompok Sadar Wisata, selanjutnya disebut dengan Pokdarwis menurut kemenpar (2012:16) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. POKDARWIS dibentuk oleh Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata no PM04/UM.001/MKP/08 tentang sadar wisata.

Pokdarwis merupakan salah satu program dari sekian banyak program pengembangan destinasi pariwisata yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pariwisata sekaligus mengembangkan ekonomi rakyat. Pembentukan Pokdarwis didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata. kedudukan Pokdarwis sebagai organisasi dibawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi

dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.

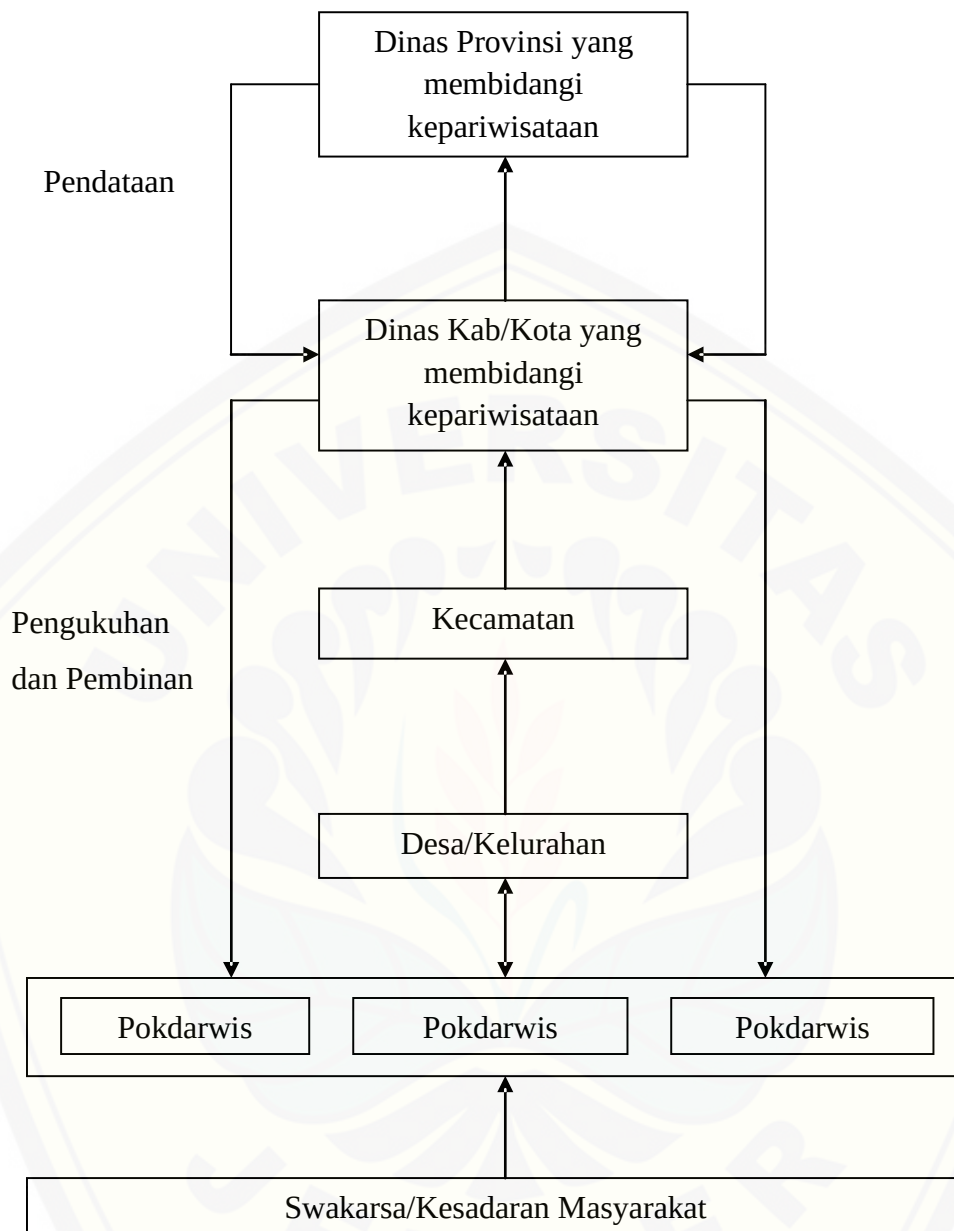
2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Berdasarkan tujuan dari pembentukan Pokdarwis dapat kita ketahui bahwa masyarakat merupakan unsur penting untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata. Karena pada dasarnya desa sumberalak mempunyai potensi yang besar untuk dikelola dan memberikan manfaat dalam pengembangan masyarakat.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis Damarwulan untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata yang ada sangat diperlukan. Karena adanya beberapa permasalahan yang ada. Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan menurut KEMENPAR (2012:29-33), yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan inisiasi dari instansi terkait di bidang Kepariwisata. Penjabaran pendekatan sebagai berikut.

- a. *Pendekatan pertama*, atau *inisiatif masyarakat* artinya Pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat. Pedoman Kelompok Sadar Wisata
- b. *Pendekatan kedua*, atau *inisiasi dari instansi terkait bidang kepariwisataan di daerah* (Dinas Pariwisata Provinsi/Dinas Pariwisata Kab/Kota) pada lokasi-lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakatnya.

Dengan *pendekatan pertama (inisiatif masyarakat)*, maka prosedur pembentukan Pokdarwis dapat digambarkan dalam skema berikut.



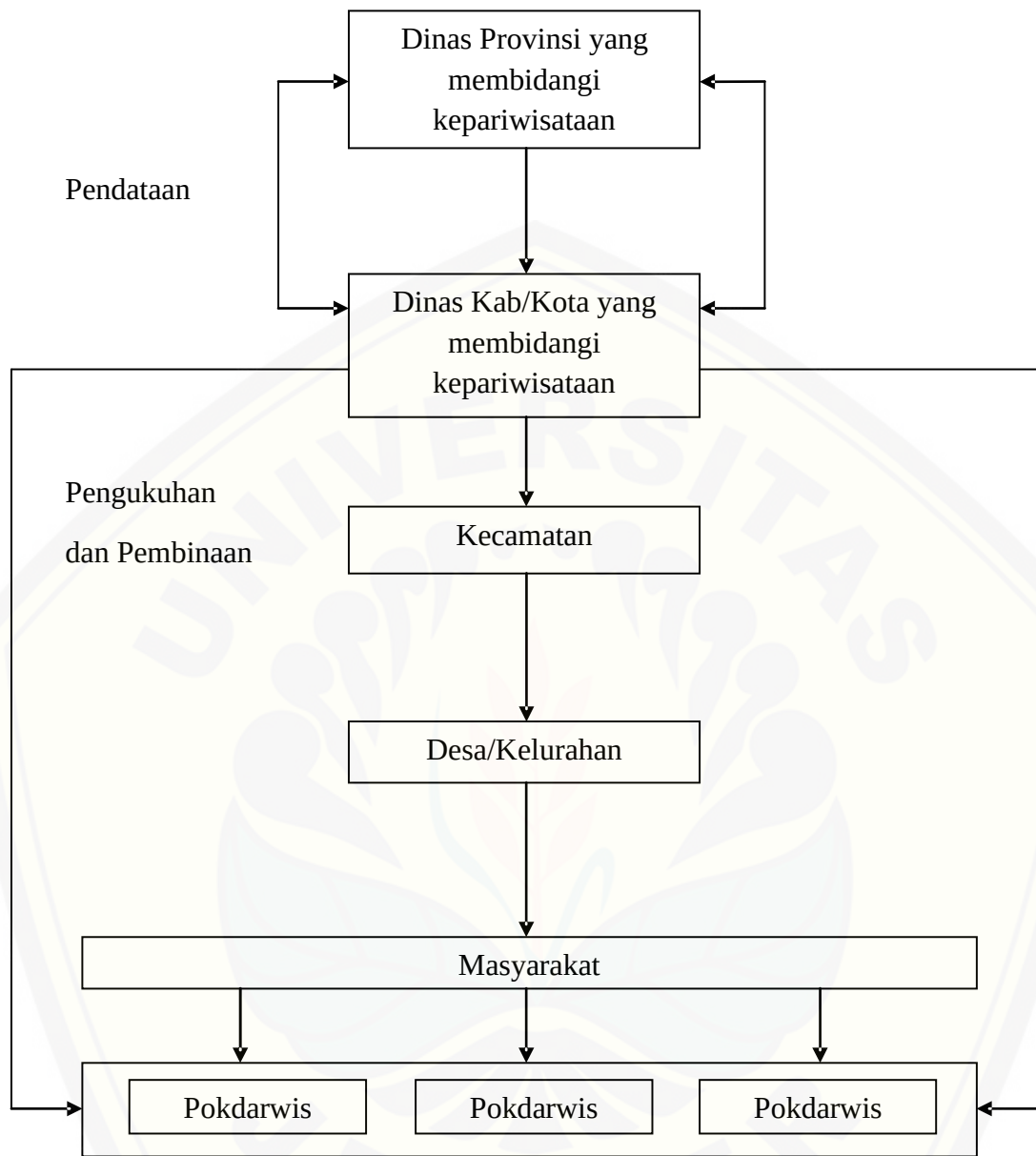
Gambar 1.1 Skema Prosedur Pembentukan Pokdarwis atas Inisiatif Masyarakat

Sumber : Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:31)

- 1) Kepala Desa/Lurah menggalang inisiatif masyarakat untuk membentuk Pokdarwis.
- 2) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pembentukan Pokdarwis oleh masyarakat kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi kepariwisataan selaku Pembina untuk mendapatkan persetujuan/pengeuhan.
- 3) Pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kepariwisataan.
- 4) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kepariwisataan untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi kepariwisataan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan *pendekatan kedua* (inisiasi instansi terkait di bidang kepariwisataan), maka prosedur pembentukan Pokdarwis sebagai berikut.

- 1) Dinas Pariwisata Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kab/Kota untuk membentuk Pokdarwis dengan menggalang inisiatif ke masyarakat di desa untuk membentuk Pokdarwis; atau inisiatif dapat muncul dari Dinas Pariwisata kab/ kota menggalang inisiatif ke masyarakat di tingkat desa untuk membentuk Pokdarwis.
- 2) Kepala Desa/Lurah memfasilitasi pertemuan warga masyarakat dengan Dinas Pariwisata untuk membentuk Pokdarwis
- 3) Hasil pembentukan Pokdarwis selanjutnya dilaporkan ke Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan pengeuhan dan pembinaan lebih lanjut.
- 4) Pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi yang membidangi Pariwisata serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 1.2 Skema Prosedur Pembentukan Pokdarwis atas Inisiasi Instansi terkait di bidang kepariwisataan

Sumber : Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:32)

Sedangkan fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
- 2) Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Pokdarwis yang ada di Kabupaten Jember tersebar di beberapa tempat wisata yang ada. Data Jumlah pariwisata dan Pokdarwisnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Wisata Alam Kabupaten Jember

No	Nama Tempat Wisata Alam	Lokasi Wisata Alam	Keterangan
1	Tanjung Papuma	Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan	Sudah dibentuk pokdarwis
2	Pantai Watu Ulo	Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu	Sudah dibentuk pokdarwis
3	Pantai Bandalit	Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo	Sudah dibentuk pokdarwis
4	Pantai Puger	Desa Puger Kulon Kecamatan Puger	Sudah dibentuk pokdarwis
5	Air Terjun Tancak	Desa Suci Kecamatan Panti	Belum dibentuk pokdarwis
6	Pantai Payangan	Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu	Sudah dibentuk pokdarwis
7	Pantai Nanggalan	Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo	Belum dibentuk pokdarwis
8	Pantai Paseban	Desa Paseban Kecamatan Kencong	Belum dibentuk pokdarwis
9	Air Terjun Anugerah	Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasari	Sudah dibentuk pokdarwis
10	Puncak SJ 88	Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk	Sudah dibentuk pokdarwis
11	Air Terjun Tancak Tulis	Desa Darungan Kecamatan Tanggul	Belum dibentuk pokdarwis
12	Air Terjun Rowosari	Desa Rowosari Kecamatan Sumberjaya	Belum dibentuk pokdarwis
13	Air Terjun Sumbersalak	Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo	Sudah dibentuk pokdarwis
14	Air Terjun Manggis	Desa Manggis Kecamatan Tanggu	Belum dibentuk pokdarwis
15	Air Terjun Antrokan	Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo	Sudah dibentuk pokdarwis
16	Air Terjun Panduman	Desa Panduman Kecamatan Jelbuk	Belum dibentuk pokdarwis
17	Air Terjun Pasaran	Gunung Malang Kecamatan Sumberjaya	Belum dibentuk pokdarwis
18	Air Terjun Sumberkalong	Desa Seputih Kecamatan Mayang	Belum dibentuk pokdarwis
19	Air Terjun Watu Ondo	Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo	Belum dibentuk pokdarwis
20	Pantai Rowo Cangak	Desa Sabrang Kecamatan Ambulu	Belum dibentuk pokdarwis
21	Pantai Kepanjen	Desa Kepanjen Kecamatan Kencong	Belum dibentuk pokdarwis

Data diolah dari berbagai sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Jember 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwasannya pengembangan wisata alam yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui Pokdarwis belum sepenuhnya terealisasi 12 destinasi wisata alam. Hanya 9 destinasi wisata alam yang sudah dibentuk Pokdarwis untuk membantu Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Tentu dengan kurangnya Pokdarwis di beberapa tempat wisata kurang mendukung rencana pemerintah pusat dan daerah mengembangkan pariwisatanya.

Pada penelitian ini, peneliti fokus kepada Pokdarwis Damarwulan yang ada di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Pemilihan

lokasi penelitian pada Pokdarwis Damarwulan karena Pokdarwis damarwulan punya potensi dalam mengelola 3 tempat wisata sekaligus di satu desa yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2 Daftar Tempat Wisata Alam di Desa Sumbersalak

No	Nama Tempat Wisata	Keterangan
1	Air Terjun Damarwulan	Sudah Berjalan Dari Akhir 2014
2	Pemandian Damarwulan	Sudah Berjalan Dari Akhir 2014
3	Air Terjun Anjasmoro	Sudah Berjalan Dari Februari 2017

Sumber : Data Pokdarwis Damarwulan 2017

Berdasarkan tabel di atas, ketiga tempat wisata tersebut telah mulai berjalan di tempat wisata air terjun damarwulan dan pemandian damarwulan pada akhir tahun 2014. Sedangkan Air Terjun Anjasmoro baru berjalan dari bulan Februari 2017. Potensi wisata tersebut kurang dimaksimalkan dengan baik sampai pada tahun penelitian ini yakni 2018 karena berbagai permasalahan yang ada. Salah satu permasalahan tersebut adalah ketiga obyek wisata ini tergolong cukup lama berjalan kecuali Air Terjun Anjasmoro tetapi masyarakat baru mengetahui jika di Desa Sumbersalak ada obyek wisata yang tidak kalah bagus dengan obyek wisata lain. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya promosi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Permasalahan Pokdarwis damarwulan yang lain adalah kurang maksimalnya peran Pokdarwis dalam melaksanakan tugas karena kurangnya pembinaan dan modal yang cukup dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Hal ini terbukti setelah Pokdarwis Damarwulan terbentuk 2 November 2016 dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Nomor 556/792/35.09.511/2016. Setelah itu pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Jember hanya memberikan penyuluhan terkait Pokdarwis ini yang diadakan di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo beberapa bulan yang lalu. Untuk lebih lanjutnya, pihak Dinas Pariwisata belum memberikan konfirmasi untuk kedepannya bagaimana mendayagunakan lembaga ini untuk mengembangkan potensi desa Sumbersalak. Ini menyebabkan beberapa Pokdarwis terutama Pokdarwis Damarwulan menjadi bingung bagaimana untuk mengembangkan

wisata alam yang ada tanpa adanya arahan atau bantuan dana lebih lanjut. sehingga mereka berusaha mengembangkan semandiri mungkin walau masih banyak menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai wawancara kami dengan pak iwan tanggal 25 juli 2017 pkl 13.00 sebagai berikut.

“bagaimanapun setelah Pokdarwis damarwulan terbentuk secara resmi oleh dinas pariwisata kita seperti harus berdiri sendiri tanpa arahan dan modal yang jelas untuk mengembangkan pariwisata di lingkup Pokdarwis damarwulan.”

Menurut wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pokdarwis damarwulan mengembangkan beberapa tempat wisata tersebut dengan usaha sendiri. Jadi pokdarwis dituntut untuk meningkatkan perannya ditengah keterbatasan yang dimiliki

Keterbatasan peran pokdarwis Damarwulan dikarenakan keterbatasan sumber daya keuangan yang hanya mengandalkan dari hasil swadaya dan retribusi sehingga dirasa belum cukup. Sehingga mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengembangkan wisata yang ada di Desa Sumbersalak. Sesuai arahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jember, saat ini sedang gencar-gencarnya untuk menggali potensi wisata desa di Kabupaten Jember melalui Pokdarwis. "Pembentukan Pokdarwis akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang merupakan bagian dari kawasan prioritas pariwisata dan Pokdarwis tersebut berada di sekitar destinasi wisata," kata Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief, Selasa (6/12/2016) (<http://surabaya.bisnis.com>).

Berdasarkan Beberapa keterbatasan yang ada di desa sumbersalak di atas, tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Wisata Alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan

diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Rumusan masalah dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan dipadukan dengan latar belakang penelitian maka rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Apa hambatan dalam peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan buku pedoman penulisan karya Ilmiah Universitas Jember (2016:38) “tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis sementara dari asumsi”. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Dari definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

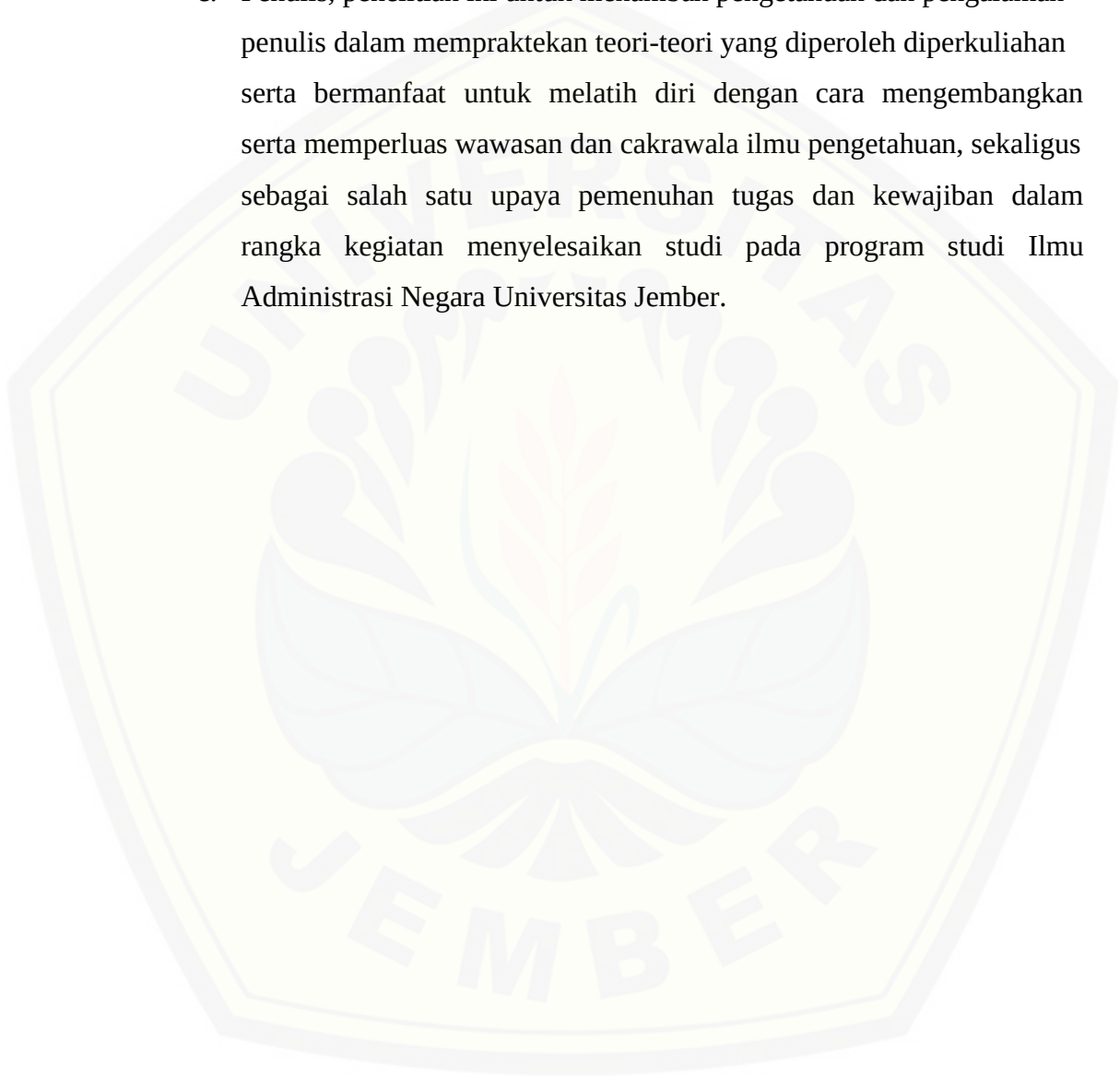
1. mengetahui peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Mengetahui hambatan dalam peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi terkini tentang pengembangan ilmu perilaku organisasi khususnya yang terjadi pada Organisasi Publik.

- b. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi serta input yang positif bagi Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masyarakat terkait terutama Pokdarwis Damarwulan, dan masyarakat sekitar obyek wisata.
- c. Penulis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam konsep dasar inilah, setelah itu peneliti mampu membuat alur berpikir dan menjadi kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti untuk menjawab sebuah fenomena sosial.

Diharapkan setelah tersusun dengan rapi saat seorang peneliti mampu merumuskan konsep dasar dengan baik sehingga alur dan kerangka berpikirnya mampu mewujudkan kerangka teoritis yang jelas maka seorang peneliti mampu mengklasifikasikan masalah dengan lebih efektif dan benar.

Berdasarkan pada definisi konsep dasar tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut.

1. Administrasi Publik
2. Sound Governance
3. Organisasi Publik
4. Perilaku Organisasi
5. Peningkatan Peran
6. Pengembangan Wisata Alam
7. Kelompok Sadar Wisata
8. Pemberdayaan masyarakat

2.2 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Waldo dalam Pasolong (2008:8) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Administrasi publik dalam perkembangannya mengalami beberapa pergeseran paradigma. Awal muncul administrasi publik yakni dengan adanya tipe organisasi lama. Administrasi publik klasik sebagaimana yang dijelaskan oleh Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance”, pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik, terinstitusionalisasi, dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hirarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi sehingga sangat sentralistik dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pemberian pelayanan publik. Besarnya intervensi pemerintah pada semua segmen kehidupan masyarakat menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal, peraturan atau kebijakan yang dibuat dimungkinkan untuk diambil alih secara penuh oleh pemerintah tanpa melibatkan berbagai aktor lainnya seperti perwakilan dari sector bisnis dan khususnya partisipasi masyarakat.

Thoha (2008:73-74) menyimpulkan inti dari Old Public Administration adalah sebagai berikut.

1. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.

2. *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
3. Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan (*implementation*) kebijakan publik.
4. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.
5. Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.
7. Nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas.
9. Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgetting*.

Perspektif administrasi publik kedua adalah New Public Management. Paradigma New Public Management muncul pada tahun 1980-an dan masih berkembang sampai sekarang. Hood (1995) yang dikutip Thoha (2010:75) mengatakan bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar.

Kettl (2000) yang dikutip Thoha (2010:75) memfokuskan New Public Management pada enam hal sebagai berikut.

1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari pasar pendapatan yang kecil.

2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki partologi birokrasi, bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional “komando-kontrol” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrat.
3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.
4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responstabilitas yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan.
5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan (kontraktor) dari perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya.
6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (*output-outcome*) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa mengganti sistem yang menekankan pada alur atas-bawah (*top-down*), dan sistem yang berorientasi pada aturan (*rule-driven systems*) kepada suatu sistem yang berorientasi pada alur bawah-atas (*bottom-up*) dan sistem berorientasi hasil.

Paradigma lain terkait administrasi publik yang muncul kemudian adalah New Public Service. New Public Service dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma Old Public Administration dan New Public Management yang dirasa belum memberikan dampak kesejahteraan dan malah menyebarkan ketidak-adilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat harusnya dianggap sebagai warga negara dan bukannya client atau pemilih seperti dalam paradigma Old Public Administration atau customer yang diusung oleh paradigma New Public Management. King dan Stivers dalam Keban (2008:247)

mendesak agar para administrator melibatkan warga masyarakat. Mereka harus bisa melihat masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan sehingga dapat membagi otoritas dan percaya dengan keefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun kepercayaan dan bersikap responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi seperti NPM. Keterlibatan masyarakat harus dilihat sebagai “investasi” yang signifikan.

Menurut (Keban, 2008:246) dapat disimpulkan paradigma NPS adalah birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan. Mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, standart yang ada dan menghargai masyarakat

Pada penelitian ini, peneliti memilih New Public Service sebagai paradigma yang digunakan karena pemerintah melibatkan masyarakat dalam mengembangkan wisata alam melalui kelompok sadar wisata yang dibentuk.

2.3 Sound Governance

Konsep ini muncul dari buah pemikiran farazmand (2004) sebagai bentuk kritik terhadap konsep *governance* lainnya. Pengertian *governance* menurut farazmand adalah sebagai berikut.

“Governance here means a participatory process of governing the social, economic, and political affairs of a country, state, or local community through structures and values that mirror the society. It includes the state as an enabling institution, the constitutional framework, the civil society, the private sector, and the international/global institutional structure within limits. Here, governance is used as a broader concept than the traditional, unilateral, and authoritative forms of government whose governing elites sit on in unilateral commanding positions. (Farazmand, 2004: 11).

Artinya Governance berarti proses partisipasi dalam penanganan urusan sosial, ekonomi dan politik dari sebuah komunitas negara atau lokal lewat struktur dan nilai yang mencerminkan masyarakat. Ini bisa memandang negara sebagai institusi pendukung, kerangka konstitusional, masyarakat sipil, sektor privat, dan struktur institusional internasional/global dalam batasannya. Di sini, *governance*

digunakan sebagai sebuah konsep yang lebih luas daripada bentuk pemerintah yang tradisional, unilateral dan otoriter yang mana elit governing-nya hanya duduk dalam posisi komando.

Oleh karena itu, Governance dikatakan inklusif, dan mengundang partisipasi dan interaksi dalam lingkungan nasional dan internasional yang kompleks, beragam dan dinamis. Konsep “soundness” digunakan untuk menggambarkan governance dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang dibutuhkan dalam governing dan administrasi (farazmand, 2004:12).

Khusus untuk konteks pemerintahan lokal, Farazmand (2004) menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam model Sound Governance-Nya yang menyatakan bahwa sebagai berikut.

Local governance under the model of sound governance demands active citizen participation, through direct or indirect involvements, co-service delivery, co-production, and co-management in transportation, housing, and the like. (Farazmand 2004: 18).

Artinya Tata kelola lokal di bawah model tata kelola yang baik menuntut partisipasi warga negara aktif, melalui keterlibatan langsung atau tidak langsung, pemberian layanan bersama, produksi bersama, dan pengelolaan bersama dalam transportasi, perumahan, dan sejenisnya. (Farazmand 2004: 18).

Namun lebih lanjut Farazmand (2004) mengemukakan bahwa agar sistem *sound governance* dapat menghasilkan inovasi kebijakan yang secara nyata mampu menghadapi secara efektif perubahan lingkungan sistemik yang terjadi memerlukan pemenuhan persyaratan terpenting, yakni adanya *effective partnership*.

“One of the most important developments in contemporary politics and administration is the building of effective partnerships for sound governance around the world (Farazmand 2004: 77). Partnership, therefore, has become a central requirement of good governance and sound governance in the contemporary global environment (Farazmand 2004: 79)”

Artinya Salah satu perkembangan paling penting dalam politik dan administrasi kontemporer adalah membangun kemitraan yang efektif untuk pemerintahan yang baik di seluruh dunia (Farazmand 2004: 77). Oleh karena itu, kemitraan telah menjadi persyaratan utama tata kelola yang baik dan tata kelola yang baik di lingkungan global kontemporer (Farazmand 2004: 79).

Adapun yang dimaksud Farazmand (2004) dengan konsep partnership di sini adalah sebagai berikut.

Partnership implies joint and voluntary endeavors toward a common purpose. In the context of sound governance, partnership is essential and requires genuine participation of the stakeholders, meaning all citizens who have stakes in the governance process. (Farazmand 2004: 81).

Artinya menyiratkan upaya bersama dan sukarela menuju tujuan bersama. Dalam konteks tata kelola yang baik, kemitraan sangat penting dan membutuhkan partisipasi yang tulus dari para pemangku kepentingan, artinya semua warga negara yang memiliki saham dalam proses tata kelola (Farazmand 2004: 81).

Esensi dari konsep partnership tersebut meliputi tiga hal, yakni, sharing power, responsibility, and achievement. (Farazmand 2004: 81). Lebih lanjut tentang partnership ini dikemukakan oleh Farazmand (2004) sebagai berikut.

The concept of partnership-based, participatory governance recognizes that expertise, initiative, responsibility, and accountability are widely shared throughout the society. Rather than being solely within the realm of central government, a society with a strong, sound governance framework and processes includes and benefits from well-developed, capacitated, institutionalized, and active stakeholders such as local governments, NGOs, citizens, and private sector organizations (Farazmand 2004: 81).

Artinya Konsep tata kelola partisipatif berbasis kemitraan mengakui bahwa keahlian, inisiatif, tanggung jawab, dan akuntabilitas secara luas dibagikan di seluruh masyarakat. Lebih dari sekadar berada dalam ranah pemerintah pusat, masyarakat dengan kerangka kerja dan proses tata kelola yang kuat dan sehat meliputi dan manfaat dari pemangku kepentingan yang berkembang baik,

berkapasitas, dilembagakan, dan aktif seperti pemerintah daerah, LSM, warga negara, dan organisasi sektor swasta (Farazmand 2004: 81).

Menurut Farazmand, partnership di tingkat local governance penting karena sebagai berikut.

“Local governments are the key implementers of policy decisions and produce the outcomes of those decisions in the governance process. It is at this level that all actions take place. In addition, local governments are closer to citizens and stakeholders, and they must be accessible and responsive to citizens. Therefore, local governance is extremely important because it is the central arena for public participation and the democratic exercise of citizens’ rights (Farazmand 2004: 89)”.

Artinya Pemerintah daerah adalah pelaksana utama dari keputusan kebijakan dan menghasilkan hasil dari keputusan tersebut dalam proses tata kelola. Pada level ini semua tindakan terjadi. Selain itu, pemerintah daerah lebih dekat dengan warga dan pemangku kepentingan, dan mereka harus dapat diakses dan responsif terhadap warga. Oleh karena itu, pemerintahan lokal sangat penting karena merupakan arena utama untuk partisipasi publik dan pelaksanaan hak-hak warga negara secara demokratis (Farazmand 2004: 89).

Lebih lanjut tentang pentingnya partnership dalam konsep Farazmand (2004) tentang sound governance di tingkat lokal dikemukakan bahwa:

“Local partnerships can be built in the forms of government–citizens relationships, government– nongovernmental and civic organizations, religious/cultural organizations–governments, university–government relationships, civil society and professional organizations–governments, local government–private sector, and local government–global corporations, supranational agencies, governments, and NGOs. These forms of partnerships can enhance the quality of governance at the local level and produce outcomes that are far superior to the traditional unilateral forms of government. They promote economic development, help prevent and reduce many social problems such as poverty and crime, tackle waste management problems, and reduce other pressures facing urbanization and local governance in general (Farazmand 2004:90)”.

Artinya kemitraan lokal dapat dibangun dalam bentuk hubungan pemerintah-warga negara, organisasi pemerintah-non-pemerintah dan sipil, organisasi keagamaan / budaya-pemerintah, hubungan universitas-pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi profesi-pemerintah, pemerintah daerah-sektor swasta, dan pemerintah daerah - perusahaan global, lembaga supranasional, pemerintah, dan LSM. Bentuk-bentuk kemitraan ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat lokal dan menghasilkan hasil yang jauh lebih unggul daripada bentuk pemerintahan tradisional sepihak. Mereka mempromosikan pembangunan ekonomi, membantu mencegah dan mengurangi banyak masalah sosial seperti kemiskinan dan kejahatan, mengatasi masalah pengelolaan limbah, dan mengurangi tekanan lain yang dihadapi urbanisasi dan pemerintahan lokal secara umum (Farazmand 2004: 90).

Namun di sisi lain juga perlu dipahami adanya sejumlah penghambat pengembangan partnership tersebut, yakni

“Distrust, regional disparities, the tendency of certain power structures to dominate globally, the higher expectations that partnership create, potential environmental conditions, ranging from political and ideological to economic and social spectrums, cultural and religious obstacles, Ethnic and racial differences that can pose serious obstacles (Farazmand 2004: 91–92)”.

Artinya ketidakpercayaan, kesenjangan regional, kecenderungan struktur kekuasaan tertentu untuk mendominasi secara global, harapan yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh partnership, kondisi lingkungan potensial, mulai dari spektrum politik dan ideologis hingga ekonomi dan sosial, hambatan budaya dan agama, perbedaan etnis dan ras yang dapat menimbulkan masalah serius. rintangan (Farazmand 2004: 91–92). Berbagai hambatan tersebut perlu diantisipasi oleh para stakeholders, karena sekali lagi Farazmand (2004) mengingatkan bahwa terbangunnya partnership merupakan prasyarat terpenting bagi terbangunnya sistem sound governance yang efektif.

“Building partnerships is one of the most essential requirements of sound governance characterized by transparency and accountability, efficiency and effectiveness, responsiveness,

fairness and justice, and citizen participation. While building effective partnerships is the first and essential step, transparency is the most important requirement for sustaining such a partnership for sound or good governance. Without transparency, partnerships are subject to failure due to the lack of openness and trust among partners in the governance process (Farazmand 2004: 96–97)”.

Artinya membangun kemitraan adalah salah satu persyaratan paling penting dari tata kelola yang baik yang ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, daya tanggap, keadilan dan keadilan, dan partisipasi warga negara. Sementara membangun kemitraan yang efektif adalah langkah pertama dan esensial, transparansi adalah persyaratan paling penting untuk mempertahankan kemitraan semacam itu untuk tata kelola yang baik. Tanpa transparansi, kemitraan dapat gagal karena kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara para mitra dalam proses tata kelola (Farazmand 2004: 96-97).

2.4 Organisasi Publik

Konsep organisasi publik menurut Ndraha (2005:18) adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan *civil*. Organisasi publik tidak murni menjalankan pelayanan, tapi ada yang menjalankan bisnis namun tetap bertujuan pada pelayanan masyarakat. Jika dianalogikan, organisasi publik dan organisasi bisnis adalah sebuah ibarat dua mata uang yang berbeda namun bisa saling melengkapi dan mengisi satu sama lain. Pola *simbiosis mutualisme* menjalankan bisnis dan pelayanan pada organisasi publik tersebut bukan merupakan yang salah. sesuai dengan pendapat yang diutarakan Osborne dan Gaebler (1992:xix) yang dikutip Kusdi (2009:52) yang menyatakan bahwa pelayanan publik melalui birokrasi pemerintahan memerlukan transformasi lebih jauh, yaitu mengubah paradigma yang selama ini digunakan. Mereka mengusulkan perombakan corak pemerintahan ke arah *entrepreneurial government*, yaitu suatu pemerintahan yang dijiwai dengan jiwa kewirausahaan. Hal ini menggambarkan ideologi bisnis disuntikkan ke dalam sektor publik. Gambaran ideal pelayanan publik diharapkan dimasa mendatang menurut

mereka adalah campuran antara karakter publik dan privat, yang pada tahap tertentu menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi kepada pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa “Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa ke pada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.” Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.

Organisasi Publik Sebagai Pemberi Layanan Publik Karakteristik organisasi publik berbeda dengan organisasi lain. Konsep “publik” memiliki makna bahwa organisasi publik memiliki area orientasi pada sektor publik. Sulistyani (2009:54) mengartikan istilah „publik“ sebagai pelanggan, yaitu seluruh masyarakat yang dilayani melalui lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Lebih lanjut Sulistyani (2009:55) menjelaskan bahwa “Organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara, sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari laba (*non profit oriented*).” Hal ini dipertegas oleh penjelasan Mahsun (2006:6) yang mengatakan bahwa organisasi *non profit oriented* merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Mahsun

(2006) merujuk pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang berkewajiban untuk menyediakan barang dan pelayanan publik untuk dinikmati masyarakat secara adil dan merata sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan.

2.5 Perilaku Organisasi

Menurut Winardi J (2003:45-47) Perilaku Organisasi, sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Dalam kaitan ini, aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur, komponen atau sub sistem dari ilmu perilaku organisasi antara lain adalah: motivasi, kepemimpinan, stres dan atau konflik, pembinaan karir, masalah sistem imbalan, hubungan komunikasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, produktivitas dan atau kinerja (performance), kepuasan, pembinaan dan pengembangan organisasi (organizational development), dan sebagainya.

Winardi. J (2003:56) juga menyatakan bahwa aspek-aspek yang merupakan dimensi eksternal organisasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, perkembangan teknologi, kependudukan dan sebagainya, menjadi kajian dari ilmu manajemen strategik (strategic management). Jadi, meskipun faktor eksternal ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya, namun tidak akan dibahas dalam konteks ilmu perilaku organisasi.

Perlu adanya Pendekatan dalam Perilaku Organisasi dalam interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia (supportif), pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas dan pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk

membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana dimana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula, sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif. Sementara itu, pendekatan kontingensimengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Disini pandangan lama yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen bersifat universal dan perilaku dapat berlaku dalam situasi apapun, tidak dapat diterima sepenuhnya. Disisi lain, pendekatan produktivitasdimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan.

Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan sosial juga merupakan hal yang penting.

2.6 Peningkatan Peran

Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat dapat juga berarti pangkat, taraf dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan, secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga diartikan penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Sedangkan Istilah “peran” diambil dari dunia drama atau teater yang hidup subur dizaman Yunani Kuno atau Romawi. “Peran” dikaitkan dengan apa yang

dimainkan atau karakterisasi yang disandang untuk dimainkan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Istilah peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005; 853) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut buku Oxford Dictionary “Peran” atau “role” dalam Bahasa Inggris diartikan: *Actor’s part; one’s task or function*, yang berarti aktor: tugas seseorang atau fungsi. Lebih lanjut Sarwono (2011: 215) menjelaskan bahwa:

“Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut”.

Pendapat tersebut dipertegas oleh Suhardono (1994:7) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat.

Seorang individu harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Peran sesama pelaku dalam permainan drama digantikan oleh orang lain yang sama-sama menduduki suatu posisi sosial sebagaimana si pelaku peran sosial tersebut.

Penonton digantikan oleh masyarakat yang menyaksikan pembawaan peran oleh seseorang pelaku peran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan peran dalam dunia teater dapat dianalogikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, dimana posisi seseorang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, harus patuh kepada skenario yang telah dibuat, yang berupa norma-norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah kehidupan yang berlaku.

Posisi peran mempunyai keterkaitan dengan harapan orang lain terhadap seseorang sesuai dengan status sosial seseorang di masyarakat dan tiap-tiap ketentuan mengenai peran pastilah menyangkut satu atau beberapa peran lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Barbara Kozier (1995: 21) menyatakan bahwa peran

merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem yang berlaku. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku seseorang yang didasarkan atas pengharapan orang lain sesuai dengan posisi, kedudukan dan norma pada situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2006:212) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran mempunyai keterkaitan dengan hak dan kewajiban, dimana hal tersebut merupakan sebuah tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang, apabila seseorang tersebut belum menjalankan tugasnya maka ia juga belum menjalankan perannya.

Menurut Suhardono (1994:3) istilah peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Pertama, melalui penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mendefinisikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berbeda dalam satu “penampilan/unjuk peran” (*role performance*).

Hubungan antara pelaku dan pasangan laku perannya bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Ungkapan lain, suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku

peran yang komplementer. Peran seseorang maupun lembaga dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan apa yang diharapkan dari seseorang maupun lembaga tersebut.

Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk memahami peningkatan peran adalah konsepsi tentang peran. Peran menurut Soerjono (2002:260) merupakan “Aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu.

- a. Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan pengertian peran tersebut, yang dimaksud dengan peningkatan peran yaitu bagaimana kondisi peran seseorang atau kelompok dulu dibandingkan dengan sekarang. Usaha-usaha atau strategi untuk meningkatkan peran tersebut. Hasil dari usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok saat ini yang belum pernah dilakukan merupakan suatu peningkatan peran. Usaha dalam peningkatan peran tersebut tertuang dalam buku pedoman pokdarwis (2012:16) adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis.
4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan

2.7 Pengembangan Wisata Alam

2.7.1 Wisata Alam

Pengertian tentang wisata alam mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (Fandeli dan Mukhlison, 2000:17). Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa "Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada baik dari masa lampau maupun masa kini.

2.7.2 Pengembangan Wisata Alam

Menurut Paturusi (2001:1) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata.

Pengembangan obyek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan

pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan obyek wisata alam berkaitan erat dengan: (a) Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam; (b) Efektifitas fungsi dan peran obyek wisata alam ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait; (c) Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan obyek wisata alam di kawasan hutan; dan (d) Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

2.8 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Sadar wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata, “suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah”. Jadi yang dimaksud kelompok sadar wisata atau disebut dengan Pokdarwis Menurut Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:16) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

2.8.1 Tujuan Kelompok Sadar Wisata

Menurut Buku pedoman kelompok sadar wisata (2012:18) Tujuan dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting alam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- 2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi

tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

- 3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

2.8.2 Lingkup Kegiatan Kelompok Sadar Wisata

Menurut Buku pedoman kelompok sadar wisata (2012:27) lingkup kegiatan Pokdarwis yang dimaksud disini adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para Pedoman Kelompok Sadar Wisata anggota alam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- 3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- 6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

2.8.3 Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang menjadi payung dalam penyusunan Kelompok Sadar Wisata ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- 3) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- 4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.
- 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

2.9 Pemberdayaan masyarakat

2.9.1 Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Rappaport mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Ginandjar Kartasmita, 1995b:18). Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.

Menurut Moh. Ali Aziz (2005:169), Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain.

Selanjutnya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Sunyoto Usman dalam Abu Hurairah (2008:87), menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

2.9.2 Tahap pemberdayaan masyarakat

Menurut Adi Fahrudin (2012:96-97) Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan :

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan.

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Pendekatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangann asyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

2.9.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, (2005:54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-

program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
3. Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
4. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran

pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, arena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial dalam Edi Suharto (2009:68-69). Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
9. Proses pemberdayaan bersifat inamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

2.10 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Penelitian merupakan proses, mulai dari proses berpikir untuk mencoba memberikan jawaban atas suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, metode penelitian memiliki suatu metode penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Situasi Sosial
4. Desain Penelitian
5. Teknik dan Alat Perolehan Data
6. Teknik Menguji Keabsahan Data
7. Teknik Penyajian Data

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Penelitian juga dilakukan di beberapa tempat untuk memperoleh data tambahan yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Waktu yang digunakan penelitian ini adalah kurang lebih dua bulan pada waktu penelitian.

3.3 Situasi Sosial

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Informan kunci atau subyek penelitian adalah orang yang memberikan informasi, menguasai, memahami obyek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti.

Berdasarkan pengertian diatas, ketiga elemen yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

1. Tempat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

2. Pelaku.

Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin dalam Idrus (2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Dalam penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yaitu.

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

- b. Kepala Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
 - c. Ketua Kelompok Sadar Wisata Damarwulan
 - d. Anggota Kelompok Sadar Wisata
 - e. Masyarakat Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
3. Aktivitas.
- Aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.
- a. Melakukan pengembangan wisata alam
 - b. Melakukan promosi wisata
 - c. Melakukan penjagaan tiket masuk, parkir, dan pusat informasi

3.4 Desain Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4.1 Fokus Penelitian

Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada mendeskripsikan peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yaitu penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis :

1. Data primer

Sumber primer ini adalah suatu objek atau dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai *first hand information*. Data-data yang dikumpulkan dalam sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi (Silalahi, 2006:266). Data primer disebut juga sebagai data orisinil dimana ini berarti informasi yang dikumpulkan tidak pernah dikumpulkan sebelumnya. Sumber data primer bisa berasal dari individu, kelompok fokus ataupun satu kelompok responden. Data primer ini memiliki kelebihan serta kekurangan, dimana kelebihan adalah data yg didapatkan ini akan sesuai dengan tujuan penelitian dari peneliti dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan serta dikontrol oleh peneliti. Sementara kekurangannya adalah pengumpulan data secara primer ini biasanya akan menghabiskan banyak biaya serta waktu sehingga menjadi tidak efisien (Silalahi, 2006:266). Teknik pengumpulan data primer ini terdiri dari beberapa cara yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sedangkan observasi dilakukan di obyek wisata alam di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder bisa berupa komentar, interpretasi ataupun pembahasan tentang materi asli atau pembahasan tentang materi dari data primer (Silalahi, 2006:266). Selain itu, data sekunder juga bisa berupa artikel-artikel dari

surat kabar ataupun majalah yang populer, buku, artikel-artikel dari jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan (Silalahi, 2006:267-268). Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember serta dokumen-dokumen dari kelompok sadar wisata.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:53) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian kualitatif pengukuran data dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Kusuma (1987:25) observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian. Menurut Moleong (2002:126),

pada observasi nonpartisipan pengamat hanya melakukan hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.

2. Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, kelompok sadar wisata, dan masyarakat di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember .

3. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:73) dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh yaitu surat keputusan pengukuhan kelompok sadar wisata Damarwulan, buku profil wisata Kabupaten Jember, brosur tempat wisata Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, serta dokumen lain yang relevan mendukung proses penelitian ini seperti segala aturan-aturan dan dasar hukum yang berkaitan dengan kelompok sadar wisata dan wisata alam.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2002:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk mengecek dan membandingkan terhadap data atau dengan data yang satu dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang tersedia dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan sebagai berikut.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan informan yang satu dengan informan yang lain.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7 Teknik Penyajian Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:53), teknik penyajian data merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dan analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Menurut Mathew dan Michael (1992:16) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

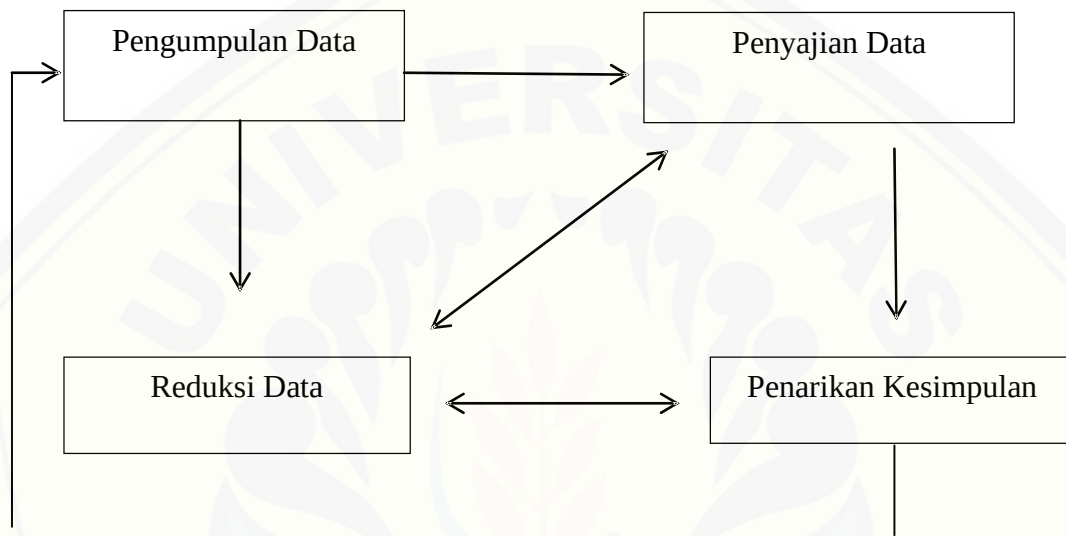
2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh

selama penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles Huberman dalam Mathew dan Michael (1992:16-17)

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan wisata alam di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang telah disebutkan berjalan dengan baik. Yakni dengan cara penyuluhan dan pemetaan potensi desa, Swadana dan Swakarya, promosi desa wisata, dan inisiator kerjasama Pokdarwis, instansi pendidikan dan masyarakat. Pengembangan wisata alam mampu meningkatkan pemahaman kepariwisataan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis melalui pengembangan obyek wisata

Sedangkan Hambatan dalam peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata Damarwulan yakni terkait dengan masalah keuangan karena tidak ada bantuan dari manapun selain swadaya pokdarwis dan warga serta pemasukan wisata yang minimal hanya dari biaya parkir. Hambatan yang lain yakni Ketergantungan pada tokoh tertentu untuk menjalankan Pokdarwis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka dapat diberikan beberapa Saran berikut agar terus terjadi peningkatan peran Pokdarwis demi pengembangan Desa Wisata yang mengarah kepada kesejahteraan bersama, yaitu antara lain:

1. Perlu adanya perbaikan kondisi keuangan dengan mencari sponsor dari pemerintah maupun non pemerintah. Lalu dapat dilakukan juga dengan pengadaan biaya tiket masuk ke tempat wisata sehingga tidak hanya biaya parkir.
2. Perlu adanya penyuluhan lebih lanjut kepada seluruh anggota Pokdarwis Damarwulan agar dalam setiap kegiatan tidak tergantung pada tokoh tertentu.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Aziz, M.A dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Ambar, Teguh Sulistyani, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Azis, M. A. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LkiS Nusantara
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Fannel, D. 1999. *Ecotourism : An Introduction*. London: Routledge. Freire P. 1972. *Pedagogy of the Opressed*. Jakarta(ID): LP3ES.
- Fandeli, C. dan Mukhlison. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. UGM. Yogyakarta.
- Farazmand, A (ed). 2004. *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Westport Connecticut: Praeger Publishers.
- Hurairah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008).
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga
- Kartasmita, G. 1995. *Pemberdayaan masyarakat suatu tinjauan administrasi*. Pidato
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Kozier, Barbara. 1995. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kusuma, S.T. 1987. *Psiko Diagnostik*. Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

- McPhail T. 2009. *Development Communication Reframing the Role of the Media*. Mc Phail, editor. West Sussex (UK): Blackwell Publishing.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1998. *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Sarwono, S. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011
- Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International –1P,
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* . Jakarta: Gramedia Pustaka Fahrudin,
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV Alfabeta
- Pitana, I Gde dan Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Offset.
- Rahim, Firmansyah. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Salim, P dan salim, Y. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern Press,
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Singhal A. 2001. *Facilitating Community participation Through Communication*. New York (US): UNICEF.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialeka Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeth
- Suwantoro, Gamal. 2009. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford. CT. Kumarian Press.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Warnock K, Schoemaker E, Wilson M. 2007. *The Case for Communication in Sustainable Development*. London (UK) : Panos London.
- Widjaja, HAW. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Press
- Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoeti, Oka A. 1990. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa
- Yoeti, Oka A. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

Surat Keputusan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Nomor : 556/792/35.09.511/2016 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Damarwulan Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Tahun Anggaran 2016

Internet/ E-book

<http://surabaya.bisnis.com/read/20161206/9/92891/jember-bangkitkan-kelompok-sadar-wisata>(diakses pada tanggal 29 Maret 2017)

E-book buku pedoman Pokdarwis Ir. Firmansyah Rahim.pdf

Nur Alam, Tendi (2017). <http://www.visitbangkabelitung.com/content/bimbingan-teknispercepatan-pengembangan-wisata-sejarah-dan-religi-tendi-nur-alam-%E2%80%9Cbikin/27/10/2017/16:23>

<https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-02294-DS%20Bab2001.pdf> .

Wisansing, J. (2005). *Component of destination branding: A case of Malaysia*. Diakses dari http://www.ttresearch.org/home/images/2553_4/6.pdf.

Skripsi, Jurnal dan Tesis

Baker, B. & Boyle, C. (2009). The Timeless Power of Storytelling. *Journal of Sponsorship*, 3(1), 79 – 87

Dorobantu, M., & Nistoreanu, P., 2012, "Rural Tourism and Ecotourism-the Main Priorities in Sustainable Development Orientations of Rural Local Communities in Romania", *EconomyTransdisciplinarity Cognition*, 15(1), 259-266.

Mustabsirah. 2015. Strategi Pengembangan Desa Wisata Studi kasus di Desa Wisata Candran, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Okech, R., Haghiri, M., & George, B. P., 2015, "Rural Tourism As a Sustainable Development Alternative: An Analysis With Special Reference to Luanda, Kenya", *Cultur-Revisa de Cultura e Turismo*, 6(3), 36-54.

Paturusi, Syamsul Alam. 2001. *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata*. Materi kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata Program Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar

Salzer-Morling, M. & Strannegard, L. (2004). Silence of the Brands. *European Journal of Marketing*, 38 (1/2), 224-238

Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama,

Srampickal J.S. 2006. Development and participatory communication. *Journal of Communication Research Trends*. 2 (25): 1-32.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



Sumber. Pokdarwis Damarwulan

LAMPIRAN 2



Sumber. [www. Metrotvnews.com/air_terjun_damarwulan](http://www.Metrotvnews.com/air_terjun_damarwulan)

LAMPIRAN 3



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

LAMPIRAN 4



Sumber. Kelompok sekarwangi, 2018

LAMPIRAN 5



Sumber. Ketua Kelompok Damarwulan, 2018

LAMPIRAN 6



Sumber. Ketua Kelompok nawangwulan, 2018

LAMPIRAN 7



Sumber. Iwan jaya, 2018

LAMPIRAN 8



Sumber. Iwan Jaya, 2018

LAMPIRAN 9



Sumber. Iwan Jaya, 2018

Dokumentasi Penelitian









